KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus Siapkan Bukti-bukti Dugaan Pelanggaran KPK
Tanggal : Selasa, 19 September 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Pansus Siapkan Bukti-bukti Dugaan Pelanggaran KPK

Jakarta, Pelita

Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan lima koper berisi bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan lembaga antikorupsi tersebut untuk ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Lima koper ini isinya dokumen dari hasil kerja Pansus Angket KPK. Di dokumen ada daftar aset sitaan KPK yang sudah kami minta konfirmasi dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan sebagian aset itu tidak terdaftar di sana," kata Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/9).

Masinton mengungkapkan Pansus Angket menemukan empat poin signifikan yaitu terkait kelembagaan KPK, anggaran, tata kelola sumber daya manusia di KPK, dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan institusi tersebut.

Dikatakannya empat temuan signifikan yang ada dalam koper tersebut akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 28 September dan sebelum itu akan dibawa ke Presiden Joko Widodo.

"Sebelum kami laporkan hasil temuan Pansus ini ke paripurna akan disampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah," ujarnya.

Dia mengatakan langkah itu dilakukan agar Presiden bisa mengkaji dan mempelajari temuan Pansus agar bisa menata politik hukum dan pemberantasan korupsi ke depan agar bisa semakin kokoh dan maju serta negara mampu bangun sitem anti korupsi.

Masinton mengatakan dalam koper itu terdapat data dan temuan terkait tata kelola rumah aman, yang disediakan KPK tidak memenuhi standar perlindungan saksi.

Selain itu, menurut dia, apa juga data yang berisi data soal beberapa pegawai KPK yang diangkat tanpa surat persetujuan atau pemberhentian di institusi asal.

"Nah bagian ini ada di dalam koper tersebut. Kemudian, apakah temuan ini kami sampaikan tanpa konfirmasi KPK, tentu kami akan mengundang untuk konfirmasi dan klarifikasi," ujarnya.

Selain itu politisi PDI Perjuangan itu berharap KPK bisa hadir memenuhi undangan Pansus sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga antikorupsi itu kepada rakyat melalui parlemen.

Selain itu, menurut dia, agar persoalan juga terang benderang dan tidak sepihak maka kehadiran KPK menjadi penting untuk memberikan konfirmasi serta klarifikasi di hadapan Pansus.

"Supaya tidak sepihak namun kalau tidak hadir kami tetap laporkan fakta yang kami temukan dalam paripurna DPR," ujarnya.

Masinton mengingatkan bahwa KPK sudah diberikan mandat di dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan wajib melaporkan kinerjanya kepada presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara terpisah anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR Mohammad Toha menilai KPK sampai saat ini masih dibutuhkan, tapi perlu dibenahi.

"Kalau tidak dibenahi maka KPK cenderung melakukan 'abuse of power'," kata Toha di depan peserta Sosialisasi Empat Pilar dengan metode "outbound" pada 15-17 September di Palembang, Sumatera Selatan, seperti disampaikan Humas MPR di Jakarta, Senin.

Toha mendapat sejumlah pertanyaan dari peserta. Salah satunya soal komitmen penguatan lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

Terkait KPK, Toha menyatakan, keberadaan lembaga antirasuah ini sebetulnya untuk meningkatkan pemberantasan korupsi. Namun dengan memiliki kewenangan yang melebihi Kejaksaan dan Kepolisian maka kekuasaan KPK seolah-olah melebihi lembaga negara yang ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembenahan KPK, menurut Toha, penting mengingat dalam melaksanakan kewenangannya lembaga ini menggunakan cara yang tak diatur dalam undang-undang, tapi melakukannya dengan peraturan yang dibuat sendiri. Salah satunya soal penyadapan.**(ant/did)**